

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian apakah terdapat hubungan yang terjadi antara koneksi politik (*political connection*) dan manajemen skandal. Dalam penelitian ini digunakan entitas bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam bentuk BUMN dan swasta pada tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap manajemen skandal dengan pengukuran berupa skandal perusahaan yang terdapat dalam media. Hal tersebut memiliki arti bahwa perusahaan BUMN yang mana dalam hal ini merupakan perusahaan terkoneksi secara politik memiliki probabilitas yang lebih besar terhadap terjadinya manajemen skandal pada perusahaan daripada perusahaan swasta yang tidak terkoneksi politik.

Koneksi politik dengan proksi *restatement* tidak berpengaruh terhadap manajemen skandal. Ketika perusahaan memiliki koneksi politik tidak berpengaruh terhadap peningkatan probabilitas terjadinya manajemen skandal yang dilihat dari penyajian ulang pelaporan keuangan.

#### **V.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- a. Entitas bisnis (perusahaan) yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini masih dalam jumlah yang sedikit sehingga belum mencerminkan populasi yang sesungguhnya.
- b. Kriteria koneksi politik hanya dilihat dari kepemilikan institusional yaitu BUMN dan non-BUMN. Kriteria koneksi tidak memasukkan nama pemegang saham minimal 10% yang terkoneksi politik, Kepala daerah dan wakilnya, daftar anggota DPR RI dan petinggi negara serta anggota partai politik.
- c. Penelitian ini belum menspesifikkan skandal yang dimaksudkan.

### V.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk peneliti-peneliti berikutnya yaitu:

1. Menambahkan sampel perusahaan.
2. Mengembangkan kriteria koneksi politik dengan menambahkan kriteria pemegang saham minimal 10% yang terkoneksi politik, nama petinggi pemerintahan seperti anggota DPR RI, Kepala dan wakil kepala daerah, pejabat atau petinggi negara serta anggota partai politik
3. Mendefenikan secara spesifik mengenai skandal manajemen tersebut.